

BAB V

KESIMPULAN

Akibat terjadinya deforestasi di hutan Kalimantan saat ini, menyebabkan berkurangnya wilayah jelajah bagi masyarakat hukum adat Dayak dalam menjalankan aktifitas perladangan berpindah atau kearifan lokalnya. Mengingat kearifan lokal tersebut terintegrasi dan berkesinambungan dalam ruang dan waktu, maka masyarakat hukum adat Dayak dalam menjalankan hak tradisionalnya dengan tidak secara lestari, dan tidak dapat dipertahankan saat ini.

Deforestasi tersebut disebabkan oleh buruknya pengelolaan hutan pada era Orde Baru dan Pasca Orde Baru, yang sama-sama mengedepankan eksploitasi pada hutan dan mengakibatkan peminggiran masyarakat hukum adat. Sehingga kearifan lokal tersebut menjadi tidak arif atau bijaksana untuk dilaksanakan pada saat ini, bukan disebabkan oleh kearifan lokal itu sendiri tetapi pengelolaan hutan yang buruk pada saat Orde Baru dan Pasca Orde Baru, yang juga melahirkan tantangan-tantangan bagi masyarakat hukum adat dalam menjalankan kearifan lokalnya.

Hutan yang merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari.

Pengelolaan hutan oleh negara berdasarkan perundang-undangan dalam prakteknya menyimpang karena adanya kebutuhan yang berbeda. Meski terdapat beragam pengakuan dan penghormatan terhadap kearifan lokal dalam perundang-undangan Indonesia saat ini, tetapi apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan masih bersifat eksploitasi, menyebabkan tidak ada ruang untuk masyarakat untuk menjalankan kearifan lokalnya.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Akib, Muhammad., *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Alikodra, Hadi S & HR, Syaukani., *Bumi Makin Panas, Banjir Makin Luas: Menyibak Tragedi Kehancuran Hutan*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2004.
- Arizona, Yance, Mary, Rakhma Siti, Nagara, Grahat., *Anotasi Putusan MK NO.45/PUU-IX/2011 Mengenai Pengujian Konstitusionalitas Kawasan Hutan Dalam Pasal 1 Angka 3 UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan*, HuMa, Jakarta, 2012.
- B. Minahan, James, *Ethnic Groups of South Asia and the Pasific: an encyclopedia I*, ABC-CLIO, LLC, California, 2012.
- Bambang, Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Cahyono, eko, et al., *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2016.
- Daru Nugroho, Bambang., *Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Davidson, Jamie S, et.al., *Adat Dalam Politik Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Forest Watch Indonesia., *Potret Keadaan Hutan di Indonesia Periode 2009-2013*, Forest Watch Indonesia, Bogor, 2014.
- Forest Watch Indonesia., *Deforestasi Tanpa Henti: Potret Deforestasi di Sumatra Utara, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara*, Forest Watch Indonesia, Bogor, 2018.
- Harsono, Boedi., *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008.

- Hidayat, Herman., *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Husin, Sukanda., *Hukum Internasional dan Indonesia tentang Perubahan Iklim*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Locatelli, B., Kanninen, M., Brockhaus, M., Colfer, C.J.P., Murdiyarso, D. dan Santoso, H., *Menghadapi Masa Depan Yang Tak Pasti: Bagaimana Hutan Dan Manusia Beradaptasi Terhadap Perubahan Iklim*, CIFOR, Bogor, 2009.
- Maunati, Yekti., *Identitas Dayak*, LKiS, Yogyakarta, 2004.
- Patlis, Jason M., *Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Hutan*, Center for International Forestry Research, Jakarta, 2004.
- Riyanto, Armada, et.at., *Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2015.
- Riwut, Tjilik, *Kalimantan Membangun Alam Dan Kebudayaan*, PT. Tiara Wacana Yogya, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 1993.
- Safitri, Myrna A & Moeliono, Tristam, *Hukum Agraria Dan Masyarakat Di Indonesia*, Huma, Jakarta, 2010.
- Safitri, Myrna A. et al., *Menuju Kepastian Dan Keadilan Tenurial: Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Tentang Prinsip, Prasyarat, Dan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah Dan Kawasan Hutan Di Indonesia*, Epistema Institute, Jalarta, 2011.
- Salim., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Supriadi., *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Siahaan, Bisuk., *Industrialisasi di Indonesia Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Stir*, Pustaka Data, Jakarta, 1996.
- Simarmata, Rikardo & Masiun, Stepanus, *Otonomi Daerah, Kecenderungan Karakter Perda dan Tekanan Baru Bagi Lingkungan dan Masyarakat Adat*, HuMa, Jakarta, 2002.

- Soekanto, Soerjono., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Sulbadana., *Prinsip Hukum Pelestarian Hutan dan Kaitannya Dengan Pemanasan Global*, Unpad Press, Bandung, 2010.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Soemarwoto, Otto., *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan Jakarta, Jakarta, 2004.
- Steni, Bernadinus., *Membedah UU Pemerintahan Daerah yang Baru*, Institut Penelitian Inovasi Bumi, Jakarta Selatan, 2016.
- Moeliono, M., Wollenberg, E., Limberg, G., *Desentralisasi Tata Kelola Hutan Politik, Ekonomi dan Perjuangan untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia*, CIFOR, Bogor, 2009.
- Mulyoutami, Elok, et al., *Perubahan Pola Perladangan: Pergeseran Persepsi Mengenai Para Peladang di Indonesia*, The World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor.
- Trinirmalaningrum, et al., *Di Balik Tragedi Asap: Catatan Kebakaran Hutan dan Lahan 2015*, The Asia Foundation, Jakarta, 2015.
- Warsilah, Henny & Wardiat, Dede., *Pembangunan Sosial Di Wilayah Perbatasan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.
- Wibowo, Ari, et.al., *REDD+ dan Forest Governance*, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Bogor, 2010.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 (*amandemen*).

Undang-Undang R.I., No. 5 Tahun 1960, *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, L.N.R.I Tahun 1960 No.104, dan T.L.N.R.I No.2043.

Undang-Undang R.I., No. 1 tahun 1967, *Penanaman Modal Asing*, L.N.R.I Tahun 1967 No. 1, dan T.L.N.R.I No.2818.

Undang-Undang R.I., No. 5 Tahun 1967, *Ketentuan–ketentuan Pokok Kehutanan*, L.N.R.I Tahun 1967 No.8, dan T.L.N.R.I No.2823.

Undang-Undang R.I., No. 11 tahun 1968, *Penanaman Modal Dalam Negeri*, L.N.R.I Tahun 1968 No.33, dan T.L.N.R.I No. 2853.

Undang-Undang R.I., No. 5 Tahun 1974, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, L.N.R.I Tahun 1974 No.38.

Undang-Undang R.I., No. 5 Tahun 1990, *Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, L.N.R.I Tahun 1990 No.49.

Undang-Undang R.I., No.22 Tahun 1999, *Pemerintah Daerah*, L.N.R.I Tahun 1999 No.60 dan T.L.N.R.I No.3839.

Undang-Undang R.I., No.25 Tahun 1999, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, L.N.R.I Tahun 1999 No.72.

Undang-Undang R.I., No. 39 Tahun 1999, *Hak Asasi Manusia*, L.N.R.I Tahun 1999 No.165 dan T.L.N.R.I No.3886.

Undang-Undang R.I., No. 41 tahun 1999, *Kehutanan*, L.N.R.I Tahun 1999 No. 167, dan T.L.N.R.I No.3888.

Undang-Undang R.I., No. 24 Tahun 2003, *Mahkamah Konstitusi*, L.N.R.I Tahun 2003 No.98 dan T.L.N.R.I No.4316.

Undang-Undang R.I., No. 32 Tahun 2004, *Pemerintah Daerah*, L.N.R.I Tahun 2004 No.125 dan T.L.N.R.I No.4437.

Undang-Undang R.I., No. 18 Tahun 2004, *Perkebunan*, L.N.R.I Tahun 2004 No.84.

Undang-Undang R.I., No. 11 Tahun 2005, *Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, L.N.R.I Tahun 2005 No.118 dan T.L.N.R.I No.4557.

Undang-Undang R.I., No. 12 Tahun 2005, *Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik*, L.N.R.I Tahun 2005 No.119 dan T.L.N.R.I No.4558.

Undang-Undang R.I., No. 26 Tahun 2007, *Penataan Ruang*, L.N.R.I Tahun 2007 No.68 dan T.L.N.R.I 4725.

- Undang-Undang R.I., No. 40 Tahun 2008, *Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*, L.N.R.I Tahun 2008 No.170 dan T.L.N.R.I No.4919.
- Undang-Undang R.I., No. 4 Tahun 2009, *Pertambangan Mineral dan Batubara*, L.N.R.I Tahun 2009 No.4 dan T.L.N.R.I No.4959.
- Undang-Undang R.I., No. 32 Tahun 2009, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, L.N.R.I Tahun 2009 No.140 dan T.L.N.R.I Tahun 2009 No.5059.
- Undang-Undang R.I., No. 11 Tahun 2013, *Pengesahan Protokol Nagoya*, L.N.R.I Tahun 2013 No.73.
- Undang-Undang R.I., No. 18 Tahun 2013, *Pencegahan dan Pemberantas Perusakan Hutan*, L.N.R.I Tahun 2013 No.130.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Pemerintahan Daerah*, L.N.R.I Tahun 2014 No.244.

III. JURNAL ILMIAH/ARTIKEL

- Asyisyifa, *Karakteristik Sistem Perladangan Suku Dayak Meratus Kecamatan Loksado Kalimantan Selatan*, Jurnal Hutan Tropis Borneo No. 25, Maret 2009.
- Darmadi, Hamid, *Dayak Asal-Usul Dan Penyebarannya Di Bumi Borneo (1)*, Jurnal Pendidikan Sosial Volume III Nomor 2, Desember 2016.
- Darmadi, Hamid., *Dayak and Their Daily Life*, *Journal of Education, Teaching and Learning*, Volume 2 Number 1, Maret 2017.
- Eko N Setiawan, Ahmad Maryudi, Ris H. Purwanto, & Gabriel Lele, 2017, *Konflik Tata Ruang Kehutanan Dengan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah)*.
- E. Siahaya, Martha, et.al., *Traditional ecological knowledge on shifting cultivation and forest management in East Borneo, Indonesia*, *International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management* Volume 12.
- Hadiwijoyo, Ereko, et.al., *Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju Di Kalimantan Tengah Dalam Melakukan Penyiapan Lahan Dengan Pembakaran*, Jurnal Silvikultur Tropika Vol. 08, April 2017.
- Onrizal, *Pembukaan Lahan Dengan Dan Tanpa Bakar*, Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, 2005

- Rahmadi, Takdir., *Pengelolaan Sumberdaya Hutan: Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Vol.32, No.3 Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2002.
- Singarimbun, Masri., *Beberapa Aspek Kehidupan Masyarakat Dayak*, Jurnal Humaniora Nomor 3, 1991.
- Siburian, Robert., *Kebijakan Kehutanan dan Akibatnya Bagi Masyarakat Lokal*, Volume VI No. 1 Jurnal Masyarakat dan Budaya, 2004.
- Singarimbun, Masri., *Beberapa Aspek Kehidupan Masyarakat Dayak*, Jurnal Humaniora Nomor 3, 1991.
- Subiakto, Wildan Deki & Bakrie, Ismail., *Peranan Hukum Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara*, Jurnal Agrifor Volume Xiv Nomor 2, Oktober 2015.
- Wasis, Basuki, *Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Terhadap Kerusakan Tanah*, Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. IX No. 2, 2003.

IV. INTERNET

- Andilala, DAD: Peladang Jangan Dikriminalisasi, Antara Kalbar, <https://kalbar.antaranews.com/berita/342953/dad-peladang-jangan-dikriminalisasi>, 1 september 2016.
- Anne Schiller, "Peaceful Movements for Justice in Indonesia", Cultural Survival, <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/peaceful-movements-justice-indonesia>, Maret 2002
- Antara News Kalimantan Tengah, Opini - Pilkada Dan Masa Depan Hutan Kita, <https://Kalteng.AntaraneWS.Com/Berita/278299/Opini--Pilkada-Dan-Masa-Depan-Hutan-Kita>, 26 Februari 2018.
- Afief Hidayat, Inilah Alasan Mengapa gambut Sulit Dipadamkan, Tempo.co, <https://tekno.tempo.co/read/711215/inilah-alasan-mengapa-gambut-sulit-dipadamkan>, 20 Oktober 2015.
- Arief Wijaya, Reidinar Juliane, Rizky Firmansyah, Nirarta Samadhi dan Hidayah Hamzah, Satu Dekade Deforestasi di Indonesia di Dalam dan di Luar Area Koneksi,

- WRI Indonesia, <http://www.wri-indonesia.org/id/blog/satu-dekade-deforestasi-di-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-area-konsesi>, 19 Juli 2017.
- Alexander Haryanto, Kerugian Masif Kebakaran Hutan Indonesia, Tirta, [://tirto.id/kerugian-masif-kebakaran-hutan-indonesia-bG1h](http://tirto.id/kerugian-masif-kebakaran-hutan-indonesia-bG1h), 07 September 2016.
- Dw, WWF: Kalimantan Bakal Kehilangan 75 Persen Hutan Pada 2020, <http://www.dw.com/id/wwf-kalimantan-bakal-kehilangan-75-persen-hutan-pada-2020/a-39124270>, 6 Juli 2017.
- Berita Satu, Tutup Celah Legalisasi Bakar Hutan, <http://sp.beritasatu.com/home/tutup-celah-legalisasi-bakar-hutan/100465>, 1 November 2015.
- Forest Watch Indonesia, Deforestasi Potret Buruk Tata Kelola Hutan, <http://fwi.or.id/publikasi/deforestasi-potret-buruk-tata-kelola-hutan/>, Agustus 2014.
- Gaung AMAN, Kearifan Berladang Tersirat Dalam Hukum Adat, <http://gaung.aman.or.id/2015/11/07/kearifan-berladang-tersirat-dalam-hukum-adat/>, 7 November 2015.
- Greenpeace, Aksi Kamu Kebakaran Hutan, <http://www.greenpeace.org/seasia/id/aksi-kamu/kebakaran-hutan/>.
- Heart of borneo, Pengelolaan Hutan Lestari, <http://heartofborneo.or.id/id/sustainable-development/detail/8/pengelolaan-hutan-lestari-phl>, 2 Februari 2018.
- Kompas.com, 62 Izin Perkebunan Diterbitkan di Kawasan Hutan, <https://ekonomi.kompas.com/read/2008/09/09/22005097/62.izin.perkebunan.diterbitkan.di.kawasan.hutan>, 09 September 2008.
- Kementerian Dalam Negeri, RTRWP Kalimantan Tengah Masih Terkendala Kawasan Hutan, <http://www.kemendagri.go.id/news/2017/10/13/rtrwp-kalimantan-tengah-masih-terkendala-kawasan-hutan>, 13 Oktober 2017.
- Kurnia Sari Aziza, Malunya Kepala BNPB Lihat Indonesia Dihujat Karena Kebakaran Hutan, Kompas.com, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/18/121500426/malunya.kepala.bnpb.lihat.indonesia.dihujat.karena.kebakaran.hutan>, 18 Mei 2017.
- Lusia Arumingtyas, Menteri Siti Terbitkan Aturan Perlindungan Kearifan Lokal, Mongabay, <http://www.mongabay.co.id/2017/06/21/menteri-siti-terbitkan-aturan-perlindungan-kearifan-lokal/>, 21 Juni 2017.

- Martha Herlinawati Simanjuntak, Laju Deforestasi Indonesia tertinggi, Antara News, <https://www.antaraneews.com/berita/474271/fwi-laju-deforestasi-indonesia-tertinggi>, 15 Januari 2015.
- Melati Yuniarsari Fauziyah, Pengelolaan Hutan Buruk Negara Merugi, Media Indonesia, <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/61594-pengelolaan-hutan-buruk-negara-merugi>, 15 Agustus 2016.
- Mesia Mediani, Menteri LHK Kebakaran Hutan akibat Pembukaan Lahan, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2017080216501220231976/menteri-lhk-kebakaran-hutan-akibat-pembukaan-lahan>, 2 Agustus 2017.
- Nedelya Ramadhani, Lahan Sawit Kalsel Dibayangi Masalah Tumpang Tindih Legalitas Izin, Borneo News, <https://www.borneonews.co.id/berita/63924-lahan-sawit-kalsel-dibayangi-masalah-tumpang-tindih-legalitas-izin>, 18 Mei 2017.
- Neneng Zubaidah, Pembakaran Lahan Bisa Suburkan Lahan Salah, Sindo News.Com, <https://Nasional.Sindonews.Com/Read/1050692/15/Asumsi-Pembakaran-Lahan-Bisa-Suburkan-Tanah-Salah-14440948866>, Oktober 2015.
- Palupi Annisa Auliani, Indonesia Jadi Negara Pengemisi Terbesar Keenam di Dunia, National Geographic, <http://nationalgeographic.grid.id/read/13294806/indonesia-jadi-negara-pengemisi-terbesar-keenam-di-dunia?page=all>, 16 Oktober 2014.
- Paulus Ade Sukma Yadi, Hutan Kalimantan dikuasai Sawit dan Tambang, Gaung Aman, <http://gaung.aman.or.id/2016/08/20/hutan-kalimantan-dikuasai-sawit-dan-tambang/>, 20 Agustus 2016.
- Putra Ananda Rabu, Kesuburan Tanah Dari Hutan Yang Terbakar Sementara, Media Indonesia, <http://MediaIndonesia.Com/Read/Detail/106986-Kesuburan-Tanah-Dari-Hutan-Yang-Dibakar-Sementara>, 31 Mei 2017.
- Profil Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, <http://www.menlhk.go.id/profil-kami.html>.
- Rhett A. Butler, Studi: Setengah dari Deforestasi di Indonesia Terjadi di Luar Wilayah Konsesi, Mongabay, <http://www.mongabay.co.id/2015/01/07/studi-setengah-dari-deforestasi-di-indonesia-terjadi-di-luar-wilayah-konsesi/>, 7 Januari 2015.
- Sapariah Saturi dan Lusya Arumingtyas, Moratorium Izin Hutan Lanjut, Apa Rencana Pemerintah Buat Tata Kelola Lahan?, Mongabay,

<http://www.mongabay.co.id/2017/05/11/moratorium-izin-hutan-lanjut-apa-rencana-pemerintah-buat-tata-kelola-lahan/>, 11 Mei 2017.

Winda Destiana Putri, BNPB Catat Kerugian Akibat Kebakaran Hutan 2015 Rp 221 Triliun, *Republika*, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/20/nzms82359-bnpb-catat-kerugian-akibat-kebakaran-hutan-2015-rp-221-triliun>, 20 Desember 2015.

Yulianisa Sulistyoningrum, Legalitas Wilayah Adat Di Hutan Nasional Masih Tidak Jelas, *Kabar24*, <http://Kabar24.Bisnis.Com/Read/20151109/16/490422/Legalitas-Wilayah-Adat-Di-Hutan-Nasional-Masih-Tidak-Jelas>, 9 November 2015.

V. SUMBER LAINNYA

United Nation, Report of The United Nations Conference on The Human Environment, June 5-16, 1972.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-22/PUUV/2007 Perkara Permohonan Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU-IX/2011 Penetapan Kawasan Hutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 atas uji materi Undang-Undang No. 41/2009 tentang Kehutanan.

Iqbal Ilhami, Perubahan Pola Perilaku Suku Dayak Bidayuh Dalam Peralihan Lahan Perladangan Di Desa Jagoi Babang, Kalimantan Barat S1 Ilmu Administrasi Negara (Manajemen Dan Kebijakan Publik), Universitas Gadjah Mada, 2016.

Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2015 dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.46/MENHUT-II/2014 tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2015.

Stone, S., León, M. C., Fredericks, P, Perubahan Iklim & Peran Hutan, Manual Pelatih. (Conservation International, 2010).

Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri, Ladang Berpindah Dan Model Pengembangan Pangan Indonesia Studi Kasus Daerah Dengan Teknik Ladang Berpindah Dan Pertanian Modern, ITN, Malang, 4 Pebruari 2017.